KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6692-4781-0940-3119

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692006/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(692006)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 22.157.098.000	(DUA PULUH DUA MILIAR SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	22.157.098.000
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.	22.157.098.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	22.157.098.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 22.157.098.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			22.157.098.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			22.157.098.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen			
		2. 01	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Perkara	17.246.154.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Layanan Kerja Sama	1.00	Layanan	299.272.000
		02 EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	109.180.000
		03 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	111.760.000
		04 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	16.700.242.000
		05 EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	18.600.000
		06 EBA.Z07	Layanan BMN	1.00	Layanan	7.100.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	61,00	Unit, m2, Paket	4.600.856.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	60.00	Unit	683.017.000
		02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	3.917.839.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	144,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	139.968.000
Rincian Output	:	01 EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM	144.00	Orang	139.968.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Layanan, Rekomendasi	170.120.000
Rincian Output	:	01 EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	100.000.000
		02 EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Rekomendasi	8.000.000
		03 EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	17.210.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

		Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan, Rekomendasi	
04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	20.870.000
05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	7.840.000
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	16.200.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026

DS:6692-4781-0940-3119

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (692006)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

							Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	22.157.098.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	22.157.098.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026

DS:6692-4781-0940-3119

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692006	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**12.340.578**	**5.215.664**	**4.600.856**	**-**	**-**	**22.157.098**		
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**12.340.578**	**5.215.664**	**4.600.856**	**-**	**-**	**22.157.098**		
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**12.340.578**	**5.215.664**	**4.600.856**	**-**	**-**	**22.157.098**		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.340.578	4.905.576	-	-	-	17.246.154	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	12.340.578	4.905.576	-	-	-	17.246.154	026	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856	026	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	139.968	-	-	-	139.968	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	139.968	-	-	-	139.968	026	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	170.120	-	-	-	170.120	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026

DS:6692-4781-0940-3119

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	170.120	-	-	-	170.120	026	
	JUMLAH	**12.340.578**	**5.215.664**	**4.600.856**	**-**	**-**	**22.157.098**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692006**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.161.144	2.020.880	2.122.276	2.837.483	1.323.173	2.103.843	1.376.986	2.527.083	1.338.071	2.558.666	1.323.181	1.464.308	22.157.098
		BELANJA PEGAWAI	773.830	899.409	1.673.239	899.409	899.409	1.673.239	899.409	899.409	899.409	899.409	899.409	1.024.998	12.340.578
		BELANJA BARANG	387.314	438.454	449.037	438.074	423.764	430.604	477.577	427.674	438.662	441.418	423.772	439.310	5.215.664
		BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.161.144	2.020.880	2.122.276	2.837.483	1.323.173	2.103.843	1.376.986	2.527.083	1.338.071	2.558.666	1.323.181	1.464.308	22.157.098
		51 BELANJA PEGAWAI	773.830	899.409	1.673.239	899.409	899.409	1.673.239	899.409	899.409	899.409	899.409	899.409	1.024.998	12.340.578
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	387.314	438.454	449.037	438.074	423.764	430.604	477.577	427.674	438.662	441.418	423.772	439.310	5.215.664
		53 BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV A. B L O K I R

DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV B. C A T A T A N

DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
692006	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**				
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**				
7099.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	3.917.839		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan				
	* Pekerjaan Peninggian Halaman Gedung Kantor dengan luas paving 4566 m2, luas pagar lanskap 300 m2, dan panjang saluran 700 m	Rp.	3.917.839		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5626-9450-0064-5003

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692006/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(692006)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 21.229.827.000	(DUA PULUH SATU MILIAR DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.229.827.000
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.	21.229.827.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.229.827.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 21.229.827.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			21.229.827.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			21.229.827.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Perkara	16.418.196.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Layanan Kerja Sama	1.00	Layanan	185.695.000
		02 EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	65.011.000
		03 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	68.812.000
		04 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	16.085.753.000
		05 EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	7.490.000
		06 EBA.Z07	Layanan BMN	1.00	Layanan	5.435.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	61,00	Unit, m2, Paket	4.600.856.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	60.00	Unit	683.017.000
		02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	3.917.839.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	144,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	102.567.000
Rincian Output	:	01 EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM	144.00	Orang	102.567.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Layanan, Rekomendasi	108.208.000
Rincian Output	:	01 EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	57.499.000
		02 EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Rekomendasi	4.988.000
		03 EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	12.223.000
		04 EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	14.118.000
		05 EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	7.010.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

		Layanan Manajemen Kinerja Internal			Layanan, Rekomendasi	
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan		12.370.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026

DS:5626-9450-0064-5003

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (692006)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

							Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	21.229.827.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	21.229.827.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026

DS:5626-9450-0064-5003

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692006	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**12.307.439**	**4.321.532**	**4.600.856**	**-**	**-**	**21.229.827**		
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**12.307.439**	**4.321.532**	**4.600.856**	**-**	**-**	**21.229.827**		
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**12.307.439**	**4.321.532**	**4.600.856**	**-**	**-**	**21.229.827**		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.307.439	4.110.757	-	-	-	16.418.196	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	12.307.439	4.110.757	-	-	-	16.418.196	026	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856	026	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	102.567	-	-	-	102.567	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	102.567	-	-	-	102.567	026	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	108.208	-	-	-	108.208	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026

DS:5626-9450-0064-5003

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	108.208	-	-	-	108.208	026	
	JUMLAH	**12.307.439**	**4.321.532**	**4.600.856**	**-**	**-**	**21.229.827**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692006**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.385.663	2.068.680	1.385.663	2.885.663	1.385.663	1.385.663	1.385.663	2.585.663	1.385.663	2.603.502	1.385.663	1.386.678	21.229.827
		BELANJA PEGAWAI	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.773	12.307.439
		BELANJA BARANG	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.905	4.321.532
		BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.385.663	2.068.680	1.385.663	2.885.663	1.385.663	1.385.663	1.385.663	2.585.663	1.385.663	2.603.502	1.385.663	1.386.678	21.229.827
		51 BELANJA PEGAWAI	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.773	12.307.439
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.905	4.321.532
		53 BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV A. B L O K I R

DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV B. C A T A T A N

DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
692006	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**				
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**				
7099.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	3.917.839		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan				
	* Pekerjaan Peninggian Halaman Gedung Kantor dengan luas paving 4566 m2, luas pagar lanskap 300 m2, dan panjang saluran 700 m	Rp.	3.917.839		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2860-0125-8181-2131

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692046/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(692046)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 3.448.774.000	(TIGA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.448.774.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	3.448.774.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	3.448.774.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 3.448.774.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.448.774.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			3.448.774.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			
		2. 01	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan			
		3. 01	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	1.081.854.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4.00	layanan	1.081.854.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	15.390.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1.00	Perkara	15.390.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	30,00	Lembaga	2.299.440.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	30.00	Lembaga	2.299.440.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	52.090.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1.00	Laporan	52.090.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026

DS:2860-0125-8181-2131

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (692046)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

									Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.448.774.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026

DS:2860-0125-8181-2131

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692046	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854	026	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	-	15.390	-	-	-	15.390	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	15.390	-	-	-	15.390	026	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440	026	
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	52.090	-	-	-	52.090	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026

DS:2860-0125-8181-2131

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	52.090	-	-	-	52.090	026	
	JUMLAH	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692046**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		BELANJA BARANG	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV A. B L O K I R

DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV B. C A T A T A N

DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8288-3294-0785-4640

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692046/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(692046)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 3.448.774.000	(TIGA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.448.774.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	3.448.774.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	3.448.774.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 3.448.774.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.448.774.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			3.448.774.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	1.081.854.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4.00	layanan	1.081.854.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	15.390.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1.00	Perkara	15.390.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	30,00	Lembaga	2.299.440.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	30.00	Lembaga	2.299.440.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	52.090.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1.00	Laporan	52.090.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026

DS:8288-3294-0785-4640

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (692046)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.448.774.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026

DS:8288-3294-0785-4640

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692046	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854	026@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	-	15.390	-	-	-	15.390	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	15.390	-	-	-	15.390	026@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440	026@	
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	52.090	-	-	-	52.090	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026

DS:8288-3294-0785-4640

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	52.090	-	-	-	52.090	026@	
	JUMLAH	**-**	**3.448.774**	**-**	**-**	**-**	**3.448.774**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692046**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		BELANJA BARANG	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV A. B L O K I R

DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
692046	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.482.991
	52 Belanja Barang	Rp.	1.482.991
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**		
7110.BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	78.469
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	24.900
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.807
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.900
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.700
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	132.233
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	101.137
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.314
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	34.986
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BCB	**Perkara Hukum Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.470
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.095
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	263
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV A. B L O K I R

DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	59.130		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	526
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden				Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	831.300				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.490				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	37.571				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	141.171				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
7110.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**						
	521211 Belanja Bahan(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.879				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.650				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)						

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV B. C A T A T A N

DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2977-4073-3031-9869

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692993/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(692993)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 2.885.803.000	(DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.885.803.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp.	2.885.803.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	2.885.803.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 2.885.803.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.885.803.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.885.803.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani			
		2. 01	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di Wilayah terhadap Standar Pelayanan			
		3. 01	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	150,00	orang	60.000.000
Rincian Output	:	01 AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	150.00	orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	2.103.843.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	1.599.275.000
		02 BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	504.568.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	721.960.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2.00	Data	721.960.000

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026

DS:2977-4073-3031-9869

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (692993)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.885.803.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026

DS:2977-4073-3031-9869

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692993	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	60.000	-	-	-	60.000	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000	026	
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843	026	
7121.BMA	Data dan Informasi Publik	-	721.960	-	-	-	721.960	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	721.960	-	-	-	721.960	026	
	JUMLAH	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692993**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		BELANJA BARANG	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV A. B L O K I R

DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV B. C A T A T A N

DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2104-5006-5541-0340

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692993/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(692993)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 2.885.803.000	(DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.885.803.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp.	2.885.803.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	2.885.803.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 2.885.803.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.05.BF		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.885.803.000
Kegiatan	:	7121		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.885.803.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi	150,00	orang	60.000.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	150.00	orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BAH		Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	2.103.843.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	1.599.275.000
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	504.568.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7121.BMA		Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	721.960.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2.00	Data	721.960.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.

HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026

DS:2104-5006-5541-0340

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (692993)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.885.803.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026

DS:2104-5006-5541-0340

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692993	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	60.000	-	-	-	60.000	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000	026@	
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843	026@	
7121.BMA	Data dan Informasi Publik	-	721.960	-	-	-	721.960	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
04	PNBP	-	721.960	-	-	-	721.960	026@	
	JUMLAH	**-**	**2.885.803**	**-**	**-**	**-**	**2.885.803**		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692993**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		BELANJA BARANG	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV A. B L O K I R

DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
692993	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.016.753
	52 Belanja Barang	Rp.	1.016.753
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**		
7121.AEF	**Sosialisasi dan Diseminasi**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.080
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.490
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.160
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.876
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7121.BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	80.684
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.000
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	46.500
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	8.400
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	41.580
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	329.133
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.310
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	225.464
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7121.BMA	**Data dan Informasi Publik**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV A. B L O K I R

DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.202		
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	13.680		
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	220.934		
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.260		
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV B. C A T A T A N

DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6272-0078-6170-0604

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693026/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(693026)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 517.000.000	(LIMA RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	517.000.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	517.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	517.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 517.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			517.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			517.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
		2. 02	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	30,00	Rekomendasi Kebijakan	404.595.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah	30.00	Rekomendasi Kebijakan	404.595.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	68.680.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah	1.00	Lembaga	68.680.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	43.725.000
Rincian Output	:	01 FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1.00	Laporan	43.725.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026

DS:6272-0078-6170-0604

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (693026)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	517.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	517.000.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026

DS:6272-0078-6170-0604

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693026	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**517.000**	**-**	**-**	**-**	**517.000**		
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**517.000**	**-**	**-**	**-**	**517.000**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**517.000**	**-**	**-**	**-**	**517.000**		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	404.595	-	-	-	404.595	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	404.595	-	-	-	404.595	026	
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	68.680	-	-	-	68.680	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	68.680	-	-	-	68.680	026	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	43.725	-	-	-	43.725	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	43.725	-	-	-	43.725	026	
	JUMLAH	**-**	**517.000**	**-**	**-**	**-**	**517.000**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693026**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000
		BELANJA BARANG	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV A. B L O K I R

DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV B. C A T A T A N

DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7133-4983-7220-8414

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693026/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(693026)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 329.823.000	(TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	329.823.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	329.823.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	329.823.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 329.823.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program		:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			329.823.000
Kegiatan		:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			329.823.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	30,00	Rekomendasi Kebijakan	257.957.000
Rincian Output		:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah	30.00	Rekomendasi Kebijakan	257.957.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	44.244.000
Rincian Output		:	01 BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah	1.00	Lembaga	44.244.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	27.622.000
Rincian Output		:	01 FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1.00	Laporan	27.622.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026

DS:7133-4983-7220-8414

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (693026)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	329.823.000
1. Rupiah Murni	Rp.	329.823.000
2. PNBP	Rp.	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		

Ket :

			Pagu		Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026

DS:7133-4983-7220-8414

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693026	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**329.823**	**-**	**-**	**-**	**329.823**		
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**329.823**	**-**	**-**	**-**	**329.823**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**329.823**	**-**	**-**	**-**	**329.823**		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	257.957	-	-	-	257.957	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	257.957	-	-	-	257.957	026	
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	44.244	-	-	-	44.244	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	44.244	-	-	-	44.244	026	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	27.622	-	-	-	27.622	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	27.622	-	-	-	27.622	026	
	JUMLAH	**-**	**329.823**	**-**	**-**	**-**	**329.823**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693026**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823
		BELANJA BARANG	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV A. B L O K I R

DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV B. C A T A T A N

DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2087-3642-4816-6626

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693094/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(693094)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 4.600.841.000	(EMPAT MILIAR ENAM RATUS JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.600.841.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 4.600.841.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:2087-3642-4816-6626

Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	38.301.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	38.301.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	4.562.540.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	4.562.540.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			38.301.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			38.301.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	38.301.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	1.00	Rekomendasi Kebijakan	38.301.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.562.540.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			4.562.540.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi			
		2. 01	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan			
		3. 01	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	20,00	Lembaga	69.100.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	20.00	Lembaga	69.100.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300,00	Orang	55.131.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	300.00	Orang	55.131.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	58,00	Lembaga	35.749.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	58.00	Lembaga	35.749.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	15.020.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data	15.020.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		442,00	Orang	3.536.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	442.00	Orang	3.536.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		62,00	Kelompok Masyarakat	661.540.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	62.00	Kelompok Masyarakat	661.540.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	190.000.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	190.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:2087-3642-4816-6626

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (693094)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

									Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	4.600.841.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	4.600.841.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:2087-3642-4816-6626

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693094	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**4.600.841**	**-**	**-**	**-**	**4.600.841**		
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**38.301**	**-**	**-**	**-**	**38.301**		
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**	**-**	**38.301**	**-**	**-**	**-**	**38.301**		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	38.301	-	-	-	38.301	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	38.301	-	-	-	38.301	026	
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**4.562.540**	**-**	**-**	**-**	**4.562.540**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**	**-**	**4.562.540**	**-**	**-**	**-**	**4.562.540**		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	69.100	-	-	-	69.100	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	69.100	-	-	-	69.100	026	
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	55.131	-	-	-	55.131	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:2087-3642-4816-6626

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	55.131	-	-	-	55.131	026	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	35.749	-	-	-	35.749	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	35.749	-	-	-	35.749	026	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik	-	15.020	-	-	-	15.020	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	15.020	-	-	-	15.020	026	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	3.536.000	-	-	-	3.536.000	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	3.536.000	-	-	-	3.536.000	026	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	-	661.540	-	-	-	661.540	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	661.540	-	-	-	661.540	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:2087-3642-4816-6626

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	190.000	-	-	-	190.000	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	190.000	-	-	-	190.000	026	
	JUMLAH	**-**	**4.600.841**	**-**	**-**	**-**	**4.600.841**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693094**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.000	352.498	130.705	328.216	195.426	307.795	154.687	947.312	1.013.998	434.163	656.040	4.600.841
		BELANJA BARANG	0	80.000	352.498	130.705	328.216	195.426	307.795	154.687	947.312	1.013.998	434.163	656.040	4.600.841
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	752	0	10.080	0	11.811	6.018	9.140	500	0	0	38.301
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	752	0	10.080	0	11.811	6.018	9.140	500	0	0	38.301
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	80.000	351.745	130.705	318.136	195.426	295.985	148.669	938.172	1.013.498	434.163	656.040	4.562.540
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	80.000	351.745	130.705	318.136	195.426	295.985	148.669	938.172	1.013.498	434.163	656.040	4.562.540

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV A. B L O K I R

DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV B. C A T A T A N

DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6680-0744-1110-8441

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693094/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(693094)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 3.591.177.000	(TIGA MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	3.591.177.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 3.591.177.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:6680-0744-1110-8441

Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	24.093.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	24.093.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.567.084.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	3.567.084.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program		:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			24.093.000
Kegiatan		:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			24.093.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.093.000
Rincian Output		:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	1.00	Rekomendasi Kebijakan	24.093.000
Program		:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.567.084.000
Kegiatan		:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			3.567.084.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	20,00	Lembaga	41.559.000
Rincian Output		:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	20.00	Lembaga	41.559.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300,00	Orang	32.679.000
Rincian Output		:	01 BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	300.00	Orang	32.679.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	58,00	Lembaga	19.693.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	58.00	Lembaga	19.693.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	8.878.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1.00	Data	8.878.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		442,00	Orang	2.828.800.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	442.00	Orang	2.828.800.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		62,00	Kelompok Masyarakat	529.232.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	62.00	Kelompok Masyarakat	529.232.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	106.243.000
Rincian Output		:	01	QDB.001 Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	106.243.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:6680-0744-1110-8441

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (693094)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

									Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.591.177.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.591.177.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:6680-0744-1110-8441

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693094	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**3.591.177**	**-**	**-**	**-**	**3.591.177**		
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**24.093**	**-**	**-**	**-**	**24.093**		
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**	**-**	**24.093**	**-**	**-**	**-**	**24.093**		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	24.093	-	-	-	24.093	03 . 51	
01	RM	-	24.093	-	-	-	24.093	026	
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**3.567.084**	**-**	**-**	**-**	**3.567.084**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**	**-**	**3.567.084**	**-**	**-**	**-**	**3.567.084**		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	41.559	-	-	-	41.559	03 . 51	
01	RM	-	41.559	-	-	-	41.559	026	
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	32.679	-	-	-	32.679	03 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:6680-0744-1110-8441

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	32.679	-	-	-	32.679	026	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	19.693	-	-	-	19.693	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	19.693	-	-	-	19.693	026	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik	-	8.878	-	-	-	8.878	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	8.878	-	-	-	8.878	026	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	2.828.800	-	-	-	2.828.800	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	2.828.800	-	-	-	2.828.800	026	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	-	529.232	-	-	-	529.232	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	529.232	-	-	-	529.232	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

DS:6680-0744-1110-8441

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	106.243	-	-	-	106.243	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	106.243	-	-	-	106.243	026	
	JUMLAH	**-**	**3.591.177**	**-**	**-**	**-**	**3.591.177**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693094**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.000	352.498	130.705	326.386	195.426	160.419	110.747	928.542	984.720	321.733	0	3.591.177
		BELANJA BARANG	0	80.000	352.498	130.705	326.386	195.426	160.419	110.747	928.542	984.720	321.733	0	3.591.177
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	752	0	10.080	0	6.743	6.018	0	500	0	0	24.093
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	752	0	10.080	0	6.743	6.018	0	500	0	0	24.093
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	80.000	351.745	130.705	316.306	195.426	153.677	104.729	928.542	984.220	321.733	0	3.567.084
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	80.000	351.745	130.705	316.306	195.426	153.677	104.729	928.542	984.220	321.733	0	3.567.084

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV A. B L O K I R

DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV B. C A T A T A N

DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8587-8053-5306-1007

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693128/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(12)	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(693128)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 119.070.000	(SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	119.070.000
135.12.WA.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp.	119.070.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	119.070.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 119.070.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen			119.070.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			119.070.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2,00	Rekomendasi Kebijakan	103.210.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	2.00	Rekomendasi Kebijakan	103.210.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	orang	15.860.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	100.00	orang	15.860.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026

DS:8587-8053-5306-1007

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (12)	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (693128)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	119.070.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	119.070.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026

DS:8587-8053-5306-1007

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693128	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**119.070**	**-**	**-**	**-**	**119.070**		
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**-**	**119.070**	**-**	**-**	**-**	**119.070**		
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**-**	**119.070**	**-**	**-**	**-**	**119.070**		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	103.210	-	-	-	103.210	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	103.210	-	-	-	103.210	026	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	15.860	-	-	-	15.860	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	15.860	-	-	-	15.860	026	
	JUMLAH	**-**	**119.070**	**-**	**-**	**-**	**119.070**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693128**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070
		BELANJA BARANG	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV A. B L O K I R

DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV B. C A T A T A N

DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4354-2274-2222-9789

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693128/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(12)	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(693128)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Sebesar	:	Rp. 69.508.000	(ENAM PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	69.508.000
135.12.WA.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp.	69.508.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	69.508.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 69.508.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen				69.508.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				69.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		2,00	Rekomendasi Kebijakan	60.513.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		2.00	Rekomendasi Kebijakan	60.513.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		100,00	orang	8.995.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		100.00	orang	8.995.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026

DS:4354-2274-2222-9789

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (12)	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker	: (693128)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	69.508.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	69.508.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026

DS:4354-2274-2222-9789

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693128	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**	**-**	**69.508**	**-**	**-**	**-**	**69.508**		
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**-**	**69.508**	**-**	**-**	**-**	**69.508**		
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**-**	**69.508**	**-**	**-**	**-**	**69.508**		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	60.513	-	-	-	60.513	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	60.513	-	-	-	60.513	026	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	8.995	-	-	-	8.995	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	8.995	-	-	-	8.995	026	
	JUMLAH	**-**	**69.508**	**-**	**-**	**-**	**69.508**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693128**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
		BELANJA BARANG	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV A. B L O K I R

DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV B. C A T A T A N

DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001